



PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS IB



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2022.

Dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien, dan efektif, maka program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2876/SEK/OT 01.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Dengan berakhirnya tahun 2022 berarti Pengadilan Negeri Sekayu telah menyelesaikan kegiatan selama satu tahun dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai renstra sebagai acuannya. Sejumlah capaian dan pelaporan di beberapa bidang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ini. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ini berisi laporan pelaksanaan tugas peradilan selama tahun 2022 baik dibidang teknis yudisial maupun non yudisial, administrasi kepaniteraan dan sekretariat, bidang pengawasan, serta bidang pembinaan dan pengelolaan.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban secara vertikal kepada Mahkamah Agung, juga sebagai bahan acuan untuk penyempurnaan tugas-tugas di tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan disusun dan diharapkan bisa menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk penyusunan program kerja selanjutnya.

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SEKAYU**



CHRISTO EVERT N. SITORUS, SH, M.Hum.
NIP. 19791212 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN	1
B. VISI dan MISI.....	2
C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	2
BAB II	
KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU.....	4
A. KEADAAN PERKARA	4
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	4
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	6
BAB III	
SUMBER DAYA MANUSIA	8
A. MUTASI	9
B. PROMOSI	10
C. PENSIUN	11
D. DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	11
BAB IV	
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	18
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	18
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	19
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	25
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	29
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU.....	29
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	31
BAB VI PENGAWASAN	38
A. INTERNAL	38
B. EVALUASI.....	40
BAB VII	
KESIMPULAN DAN SARAN	41
A. KESIMPULAN	41
B. SARAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	4
Tabel 2 JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS	4
Tabel 3 JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU.....	5
Tabel 4 JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN	5
Tabel 5 JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI	6
Tabel 6 JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI.....	6
Tabel 7 DAFTAR NAMA KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM,PEJABAT STRUKTURAL	8
Tabel 8 NAMA PEGAWAI MUTASI MASUK PANGADILAN NEGERI SEKAYU	9
Tabel 9 NAMA PEGAWAI MUTASI KELUAR PANGADILAN NEGERI SEKAYU	9
Tabel 10 DAFTAR NAMA PROMOSI JABATAN KELUAR PENGADILAN NEGERI SEKAYU	10
Tabel 11 DAFTAR NAMA PROMOSI JABATAN MASUK PENGADILAN NEGERI SEKAYU	11
Tabel 12 NAMA PEGAWAI PENSIUN PENGADILAN NEGERI SEKAYU	11
Tabel 13 DAFTAR NAMA YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS PENGADILAN NEGERI SEKAYU	11
Tabel 14 DAFTAR NAMA YANG MENGIKUTI DIKLAT NON TEKNIS PENGADILAN NEGERI SEKAYU TAHUN 2022.....	13
Tabel 15	18
Tabel 16 PAGU DIPA BELANJA MODAL	18
Tabel 17 PENANGANAN PANDEMI COVID 19.....	19
Tabel 18 PAGU DIPA 03.....	19
Tabel 19 DATA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA	19
Tabel 20 DATA KEADAAN RUMAH DINAS TAHUN 2022	20
Tabel 21 SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG PENGADILAN NEGERI SEKAYU	24
Tabel 22 Jumlah Perkara yang mendaftar melalui e-court PENGADILAN NEGERI SEKAYU	26
Tabel 23 Berkas Perkara yang telah menggunakan berpadu per 31 Desember 2022.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Aplikasi SI-KUPEK Admin	15
Gambar 2 Aplikasi SIKUPEK Pegawai	16
Gambar 3 Menu Admin Aplikasi Si-Kupek	16
Gambar 4 Menu Pegawai Aplikasi Si-Kupek.....	17
Gambar 5 Informasi Kepegawaian	17
Gambar 6 Pencanaan Zona Integritas PN Sekayu yang di upload di Website PN Sekayu.....	29
Gambar 7 Spanduk Pencanaan Zona Integritas PN Sekayu.....	30
Gambar 8 Ruang Pelayanan PTSP.....	31
Gambar 9 Antrian PTSP.....	31
Gambar 10 Antrian Sidang.....	32
Gambar 11 Antrian Sidang.....	32
Gambar 12 Persidangan secara Online	33
Gambar 13 Dokumen Yang Ditandatangani Secara Elektronik.....	34
Gambar 14 Aplikasi SILANVATOR	35
Gambar 15 Daftar Pengajuan di Halaman Admin	35
Gambar 16 Aplikasi PTSP SIMBA.....	36
Gambar 17 Mobil Layanan Antar Jemput Difabel Pengadilan Negeri Sekayu	36
Gambar 18 Pojok Layanan Mandiri	37
Gambar 19 Ruang Pengaduan.....	37
Gambar 20 Briefing terhadap petugas PTSP dan Security	39
Gambar 21 Hakim Pengawas Bidang sedang melakukan pengawasan	39
Gambar 22 Rapat Bulanan sekaligus Pemantauan Kinerja	39
Gambar 23 Evaluasi penilaian Kinerja Tenaga Honoror	40

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan. Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Sekayu ada program prioritas, antara lain adalah:

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Denganadanya SKKMAI/144/2007 maka pada Pengadilan Negeri Sekayu juga telah dibuat program website PN Sekayu dengan alamat: www.sipp.pn-sekayu.go.id, program telah berjalan dengan update setiap saat. Program penelusuran perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Sekayu telah dapat memberikan informasi pada pencari keadilan.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini Pengadilan Negeri Sekayu telah menyediakan meja informasi, dan meja pengaduan, dimana meja informasi dan pengaduan ini berada dibawah tanggung jawab Panitera Muda Hukum yang telah memperoleh pelatihan singkat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Juga tersedia *e-court helpdesk*, yang dapat membantu masyarakat dalam hal informasi mengenai *e-court* dan penggunaan aplikasi *e-court*.

3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah AgungRI

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung2011-2035, Pengadilan Negeri

Sekayu berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut.

4. Program aplikasi SI-KUPEK, SILANVATOR, SI-PINTER, PTSP SIMBA (Sinergi MUBA) dan TandaTangan Elektronik agar kegiatan perkantoran berjalan dengan lancar.

B. VISI dan MISI

1. VISI Pengadilan Negeri Sekayu sesuai dengan Visi Mahkamah Agung-RI
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”
2. MISI Pengadilan Negeri Sekayu sesuai juga dengan Misi Mahkamah Agung RI
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
 2. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pengadilan Negeri Sekayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sekayu, dalam hal ini Renstra tahun 2020-2024.

1. Renstra Pengadilan Negeri Sekayu merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visi secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sekayu pada saat ini adalah disesuaikan dengan Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024.
2. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Sekayu lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan sub program Pengadilan Tinggi yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Rencana strategis ini diharap didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu, baik lingkungan internal maupun eksternal.
3. Pengadilan Negeri Sekayu sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya Rencana Strategis juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sekayu yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI.

Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi pada tahun 2020-2024.

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sekayu yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Sekayu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sekayu untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

Kedua tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan akhir dari Pengadilan Negeri Sekayu adalah terlaksananya prinsip *good governance* di lingkungan Pengadilan yang tergambar dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Agar pencapaiannya dapat dilakukan secara maksimal, maka harus ditunjang dengan pelaksanaan berbagai aspek pelaksanaan reformasi yaitu : peningkatan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas, peningkatan profesionalisme SDM Aparatur yang berbasis kompetensi.

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas aparatur, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

A. KEADAAN PERKARA

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB terdiri dari Perkara Pidana dan Perkara Perdata. Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2022 secara umum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dikarenakan adanya pemisahan wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Adapun rincian penyelesaian perkara perdata dan perkara pidana adalah sebagai berikut :

Tabel 1 JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS

NO	Jenis Perkara	Masuk	Putus	Sisa	BDG	KS	PK
1	Pidana	513	516	72	15	12	3
2	Pidana Anak	14	14	1	-	-	-
3	Pidana Lalu Lintas	2998	2998	-	-	-	-
4	Pidana Ringan	-	-	-	-	-	-
5	Perdata Gugatan	59	47	12	18	2	-
6	Perdata Permohonan	30	29	1	-	-	-
7	Perdata Gugatan Sederhana	10	10	-	-	-	-

B. PENYELESAIAN PERKARA

Jumlah sisa perkara tahun 2021 yang diputus pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB adalah sebagai berikut :

Tabel 2 JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

No	Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara	Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Pidana	75	75	-	
2	Pidana Anak	1	1	-	
3	Pidana Lalu Lintas	26	26	-	
4	Pidana Ringan	-	-	-	
5	Perdata Gugatan	14	14	-	
6	Perdata Permohonan	1	1	-	

No	Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara	Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
7	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB adalah sebagai berikut:

Tabel 3 JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

No	Jenis Perkara	Perkara Ditangani (Sisa Perkara Tahun lalu + Perkara Masuk)	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	Sisa Perkara
1	Pidana	588	516	72
2	Pidana Anak	15	14	1
3	Pidana Lalu Lintas	3.024	3.024	-
4	Pidana Ringan	-	-	-
5	Perdata Gugatan	59	47	12
6	Perdata Permohonan	30	29	1
7	Perdata Gugatan Sederhana	10	10	-

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB adalah sebagai berikut :

Tabel 4 JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Putus	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK			Keterangan
			Banding	Kasasi	PK	
1	Pidana	516	501	504	513	
2	Pidana Anak	14	14	14	14	
3	Pidana Lalu Lintas	3.024	3.024	3.024	3.024	
4	Pidana Ringan	-	-	-	-	
5	Perdata Gugatan	47	29	45	47	
6	Perdata Permohonan	29	29	29	29	
7	Perdata Gugatan Sederhana	10	10	10	10	

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB adalah sebagai berikut :

Tabel 5 JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Masuk	Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi	Keterangan
1	Perdata Gugatan	45	3	

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB adalah sebagai berikut :

Tabel 6 JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Masuk	Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi
1	Pidana Anak	14	0

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum Dalam Memberikan Pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB, yang berada dibawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu. Hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya Surat Keputusan Nomor : 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2022 tentang Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai 712 Predikat A pada tanggal 10 Maret 2021. Adapun beberapa program dalam rangka meningkatkan pelayanan publik diantaranya adalah :

- **Posbakum**

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin yang mengajukan pelayanan bantuan hukum.

Dalam tahun 2022 Pengadilan Negeri Sekayu telah merealisasikan pelaksanaan posbakum dengan jumlah jam pelayanan sebanyak 312 jam layanan dengan biaya sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2022.

- **Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri Sekayu dalam bentuk Sidang Keliling atau sidang ditempat sidang tetap. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sekayu tidak ada melaksanakan sidang keliling dan sidang ditempat.

- **Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)**

Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah dengan menanggung biaya proses perkara di Pengadilan Negeri Sekayu sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB tidak memiliki anggaran Pembebasan Biaya Perkara.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung kepada kualitas, integritas dan kinerja individu yang bekerja didalamnya. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Negeri Sekayu dengan Ketua, Wakil, Hakim, Pejabat Struktural dan Pejabat Pelaksana Staf yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 26 orang.

Tabel 7 DAFTAR NAMA KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT PELAKSANA STAF

NO	NAMA	JABATAN
1.	CHRISTO EVERT NATANAEL SITORUS, S.H., M.Hum.	KETUA
2.	SILVI ARIANI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA
3.	EDO JUNIANSYAH, S.H.	HAKIM
4.	ARIEF HERDIYANTO USUMO, S.H., M.H.	HAKIM
5.	GERRY PUTRA SUWARDI, S.H.	HAKIM
6.	MUHAMAD NOVRIANTO, S.H.	HAKIM
7.	LIGA SAPLENDRA GINTING, S.H.	HAKIM
8.	RAMLI, S.H., M.H.	PANITERA
9.	SAHRURI, S.KOM.	PLT. SEKRETARIS
10.	HADI CANDRA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA
11.	ENRIK PEDI ENDORA, S.H., M.M.	PANITERA MUDA PERDATA
12.	RINA SILVIANA, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM
13.	SHANDIWURI SUNKAR, S.H., M.H.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA
14.	ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN
15.	BAMBANG HERMANTO, S.H.	PANITERA PENGGANTI
16.	MARINA WIJAYASARI, S.H.	PANITERA PENGGANTI
17.	HERI WIBOWO, S.H.	PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA	JABATAN
18.	MUHAMMAD ANWAS, S.H.	PANITERA PENGGANTI
19.	BUDIMAN	JURUSITA
20.	FATMA OKTAVIANA, S.E.	ANALIS TATA LAKSANA
21.	PERMATA TIEN SUHARTA, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN
22.	MIFTAKHUL JANNAH, A.MD.Kom.	BENDAHARA PENGELUARAN
23.	LOLYTA SIANTURI, A.MD.	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA
24.	GRACIA WULANDARI MANURUNG, S.H.	CPNS / ANALIS PERKARA PERADILAN
25.	PUTRI CARERA SANTI ROMAULI SIMAMORA, S.H.	CPNS / ANALIS PERKARA PERADILAN
26.	MUHAMMAD ARDIAN PUTRA PRATAMA, A.MD.A.B.	CPNS / PENGELOLA PERKARA

A. MUTASI

Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang Mutasi Masuk dan 7 (tujuh) orang Mutasi Keluar antara lain:

Tabel 8 NAMA PEGAWAI MUTASI MASUK PANGADILAN NEGERI SEKAYU

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Miftakhul Jannah, A.Md.Kom. NIP. 19961030 201903 2 005	Pranata Kearsipan PN Mojokerto	Pranata Kearsipan PN Sekayu

Tabel 9 NAMA PEGAWAI MUTASI KELUAR PANGADILAN NEGERI SEKAYU

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Christoffel Harianja, S.H. NIP. 19781225 200704 1 001	Hakim PN Sekayu Kelas II	Hakim PN Sukabumi Kelas IB
2.	Andy Wiliam Permata, S.H. NIP. 19780622 200704 1 001	Hakim PN Sekayu Kelas II	Hakim PN Cibadak Kelas IB
3.	Rizkiansyah, S.H., LL.M	Hakim PN Sekayu Kelas II	Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi
4.	Melly Norviana, A.MD. NIP. 19770530 200912 2 002	Jurusita PN Sekayu Kelas II	Jurusita PN Pangkalan Balai Kelas II

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
5.	Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li NIP. 19780713 200112 2 003	Wakil Ketua PN Sekayu Kelas II	Wakil Ketua PN Wonosari Kelas II
6.	Nurul Fathiyah, S.Kom. NIP. 19910217 201503 2 001	Bendahara Pengeluaran PN Sekayu Kelas IB	Analisis Perencanaan PT Palembang
7.	Fitri Agustina, S.H. NIP. 19790825 200604 2 002	Wakil Ketua PN Sekayu	Wakil Ketua PN Pangkalan Balai II

B. PROMOSI

Selama tahun 2022, di Pengadilan Negeri Sekayu telah terjadi promosi pegawai sebanyak 7 (tujuh) orang Promosi Keluar dan 3 (tiga) orang Promosi Masuk antara lain :

Tabel 10 DAFTAR NAMA PROMOSI JABATAN KELUAR PENGADILAN NEGERI SEKAYU

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Beny Herlambang, S.H. NIP. 19840201 200604 1 002	Panitera Pengganti PN Sekayu	Panitera Muda Hukum PN Prabumulih
2.	Ridha Alhaj, S.H. NIP. 19880202 201101 1 006	Jurusita Pengganti PN Sekayu	Panitera Pengganti PN Kayu Agung
3.	Fakhrizal, S.Kom., S.H. NIP. 19810813 200502 1 002	Panitera Pengganti PN Sekayu	Panitera Muda Pidana PN Pagar Alam
4.	Hariyansah, S.H., M.H. NIP. 19870520 200912 1 008	Panitera Pengganti PN Sekayu	Panitera Muda Hukum PN Baturaja
5.	Ben Ronald.P. Situmorang, S.H., M.H. NIP. 19780901 200112 1 002	Ketua PN Sekayu Kelas IB	Wakil Ketua PN Tenggarong Kelas I B
6.	Abunawas, S.H. NIP. 19700520 199203 1 004	Panitera PN Sekayu	Panitera PN Kayuagung Kelas I B
7.	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H. NIP. 19800831 200604 2 001	Sekretaris PN Sekayu Kelas I B	Kepala Bagian Umum dan Keuangan PT TUN Palembang

Tabel 11 DAFTAR NAMA PROMOSI JABATAN MASUK PENGADILAN NEGERI SEKAYU

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum. NIP. 19791212 200312 1 001	Wakil Ketua PN Siak Sri Indrapura	Ketua PN Sekayu
2.	Fitri Agustina, S.H. NIP. 19790825 200604 2 002	Hakim PN Prabumulih	Wakil Ketua PN Sekayu
3.	Silvi Ariani, S.H., M.H. NIP. 19760929 200112 2 006	Ketua PN Pangkalan Balai Kelas II	Wakil Ketua PN Sekayu Kelas I B

C. PENSIUN

Pensiun Pegawai pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB pada Tahun 2022 sebanyak 0 (nol) orang yaitu :

Tabel 12 NAMA PEGAWAI PENSIUN PENGADILAN NEGERI SEKAYU

NO	NAMA	JABATAN	PENSIUN TMT
-	-	-	-

D. DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Data Sumber Daya Manusia Teknis yang mengikuti Diklat Pada Tahun 2022 :

Tabel 13 DAFTAR NAMA YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS PENGADILAN NEGERI SEKAYU

No.	NAMA/NIP	JABATAN	DIKLAT YANG TELAH DIKUTI	TGL DIKLAT	KET
1.	Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li NIP. 19780713 200112 2 003	Wakil Ketua	Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Elementary bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang	09 Maret 2022 s.d 19 Maret 2022	<i>Blended Learning</i>
2.	Abunawas, S.H. NIP. 19700520 199203 1 004	Panitera	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Peradilan Seluruh Indonesia	15 Maret 2022 s.d 17 Maret 2022	Online
3.	Bambang Hermanto, S.H. NIP. 19670705 198803 1 004	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Peradilan Seluruh Indonesia	15 Maret 2022 s.d 17 Maret 2022	Online

No.	NAMA/NIP	JABATAN	DIKLAT YANG TELAH DIIKUTI	TGL DIKLAT	KET
4.	Beny Herlambang, S.H. NIP. 19840201 200604 1 002	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Peradilan Seluruh Indonesia	15 Maret 2022 s.d 17 Maret 2022	Online
5.	Hadi Candra, S.H. NIP. 19760808 200904 1 001	Panmud Pidana	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Peradilan Seluruh Indonesia	22 Maret 2022 s.d 24 Maret 2022	Online
6.	Enrik Pedi Endrora, S.H., M.M. NIP. 19830810 200912 1 004	Panmud Perdata	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Peradilan Seluruh Indonesia	22 Maret 2022 s.d 24 Maret 2022	Online
7.	Fakhrizal, S.Kom, S.H. NIP. 19810813 200502 1 002	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Peradilan Seluruh Indonesia	22 Maret 2022 s.d 24 Maret 2022	Online
8.	Hariyansah, S.H., M.H. NIP. 19870520 200912 1 008	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Peradilan Seluruh Indonesia	22 Maret 2022 s.d 24 Maret 2022	Online
9.	Marina Wijayasari, S.H. NIP. 1988030 201101 2 008	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Peradilan Seluruh Indonesia	29 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022	Online
10.	Heri Wibowo, S.H. NIP. 19870111 201212 1 002	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Peradilan Seluruh Indonesia	29 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022	Online
11.	Rina Silviana, S.H., M.H.. NIP. 19840920 201212 2 001	Panmud Hukum	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Peradilan Seluruh Indonesia	12 April 2022 s.d 14 April 2022	Online
12.	Ridha Alhaj, S.H. NIP. 19880202 201101 1 006	Jurusita Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 Peradilan Seluruh Indonesia	12 April 2022 s.d 14 April 2022	Online
13.	Edo Juniansyah, S.H. NIP. 19870611 201101 1 007	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVII	25 Juli 2022 s.d. 30 30 Agustus 2022	Online dan Klasikal
14.	Fitri Agustina, S.H. NIP. 19790825 200604 2 002	Wakil Ketua	Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim dan Panitera	24 Oktober 2022 s.d. 16 November 2022	Online dan Klasikal
15.	Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum. NIP. 19791212 200312 1 001	Ketua	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran	06 Desember 2022 s.d. 09	Online

No.	NAMA/NIP	JABATAN	DIKLAT YANG TELAH DIKUTI	TGL DIKLAT	KET
			Perkara Lingkungan Hidup	Desember 2022	
16.	Edo Juniansyah, S.H. NIP. 19870611 201101 1 007	Hakim	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	06 Desember 2022 s.d. 09 Desember 2022	Online
17.	Ramli, S.H., M.H. NIP. 19660805 198703 1 003	Panitera	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	06 Desember 2022 s.d. 09 Desember 2022	Online
18.	Hadi Candra, S.H. NIP. 19760808 200904 1 001	Panmud Pidana	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	06 Desember 2022 s.d. 09 Desember 2022	Online
19.	Enrik Padi Endrora, S.H., M.M. NIP. 19830810 200912 1 004	Panmud Perdata	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	06 Desember 2022 s.d. 09 Desember 2022	Online
20.	Permata Tien Suharta, S.H. NIP. 19971022 202012 2 003	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	06 Desember 2022 s.d. 09 Desember 2022	Online
21.	Santi Novita Sari, A.Md.	Petugas PTSP	Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup	06 Desember 2022 s.d. 09 Desember 2022	Online

Data Sumber Daya Manusia Non Teknis yang mengikuti Diklat Pada Tahun 2022 :

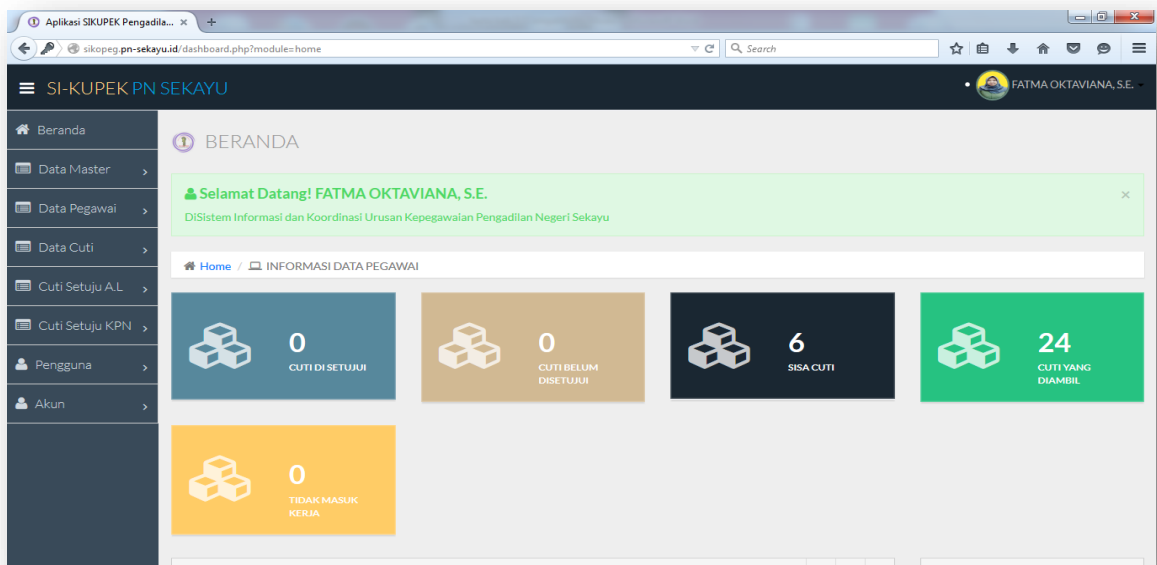
Tabel 14 DAFTAR NAMA YANG MENGIKUTI DIKLAT NON TEKNIS PENGADILAN NEGERI SEKAYU TAHUN 2022

No.	NAMA/NIP	JABATAN	DIKLAT YANG TELAH DIKUTI	TGL DIKLAT	KET
1.	Rina Silviana, S.H., M.H.. NIP. 19840920 201212 2 001	Panmud Hukum	Pelatihan <i>Champion Meeting - Court Excellence Training TA 2022</i>	13 Januari 2022 s.d 17 Januari 2022	Offline
2.	Lolyta Sianturi, A.Md. NIP. 19920915 202012 2 007	Pengadmi nistrasi Regstrasi Perkara	Latsar CPNS <i>Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang II Golongan II Angkatan I s.d XIV Tahun 2022</i>	09 Maret 2022 s.d 31 Mei 2022	Online

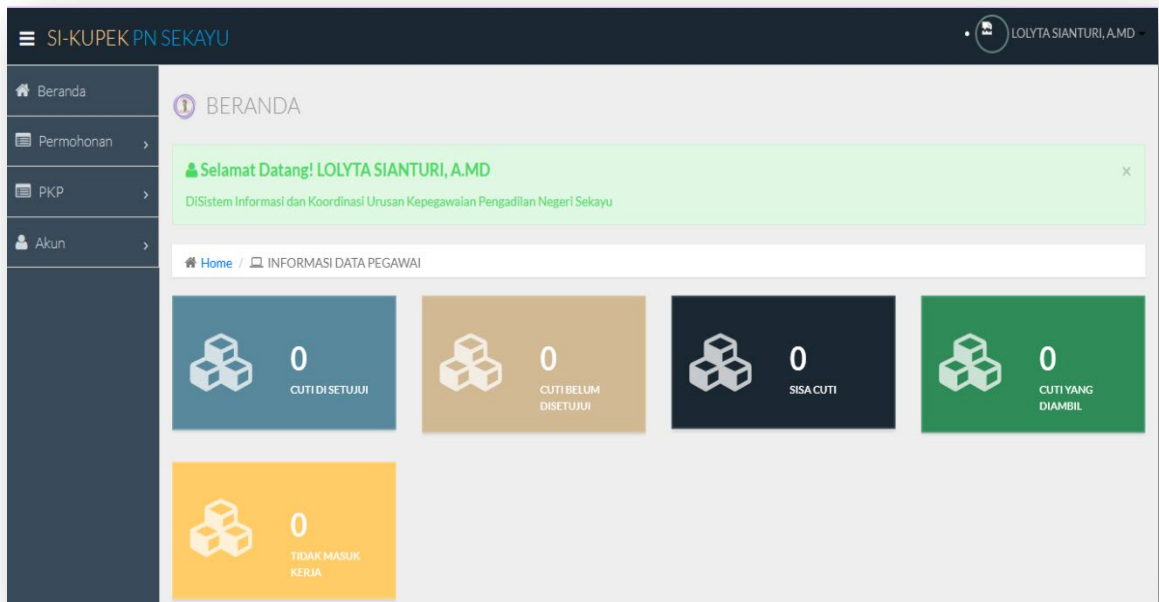
No.	NAMA/NIP	JABATAN	DIKLAT YANG TELAH DIKUTI	TGL DIKLAT	KET
3.	Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li NIP. 19780713 200112 2 003	Wakil Ketua	<i>Toefl Preparation</i>	04 April 2022	Online
4.	Liga Saplendra Ginting, S.H. NIP. 19950420 201712 1 003	Hakim	<i>Toefl Preparation</i>	04 April 2022	Online
5.	Lolyta Sianturi, A.Md. NIP. 19920915 202012 2 007	Pengadmi nitstrasi Registrasi Perkara	Kegiatan Lapangan Api Semangat Bela Negara	06 April 2022 s.d 07 April 2022	Online
6.	Lolyta Sianturi, A.Md. NIP. 19920915 202012 2 007	Pengadmi nitstrasi Registrasi Perkara	Pelatihan Muatan Lokal Kompetensi Teknis Bidang Tugas bagi Peserta Larsat CPNS Gelombang II Golongan II Angkatan I s.d. XIV secara Online dari Tempat Tugas TA. 2022	30 Mei 2022 s.d 03 Juni 2022	Online
7.	Gracia Wulandari Manurung, S.H. NIP. 19920625 202203 2 008	CPNS / Analisis Perkara Peradilan	Latsar CPNS secara <i>blended learning</i> kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Golongan II dan III angkatan VIII, IX, XII, XIII, XIV Tahun 2022	15 Agustus 2022 s.d 12 November 2022	<i>Blended Learning</i>
8.	Putri Carera Santi Romauli Simamora, S.H. NIP. 20000816 202203 2 002	CPNS / Analisis Perkara Peradilan	Latsar CPNS secara <i>blended learning</i> kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Golongan II dan III angkatan VIII, IX, XII, XIII, XIV Tahun 2022	15 Agustus 2022 s.d 12 November 2022	<i>Blended Learning</i>
9.	M. Ardian Putra Pratama, A.Md, A.B. NIP. 19980826 202203 1 004	CPNS / Pengelola Perkara	Latsar CPNS secara <i>blended learning</i> kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Golongan II dan III angkatan VIII, IX, XII, XIII, XIV Tahun 2022	15 Agustus 2022 s.d 12 November 2022	<i>Blended Learning</i>
10.	Fatma Oktaviana, S.E. NIP. 19881022 201903 2 008	Analisis Tata Laksana	Pelantihan Online Manajemen ASN Angkatan 4 dari Tempat Tugas Tahun 2022	30 September 2022 s.d. 21 Oktober 2022	Online
11.	Shandiwuri Sunkar, S.H., M.H. NIP. 19890917 201212 2 001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Pelantihan Online Manajemen Barang Milik Negara Angkatan I s,d, V dari tempat tugas	17 Oktober 2022 s.d. 21 Oktober 2022	Online

Untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran covid 19 maka Pengadilan Negeri Sekayu berinovasi mengeluarkan Aplikasi SI-KUPEK (Sistem Informasi dan Koordinasi Urusan Kepegawaian). Sistem Informasi dan Koordinasi Urusan Kepegawaian (SI-KUPEK) adalah aplikasi yang dikembangkan melalui aplikasi DUK (Daftar Urut Kepangkatan). Aplikasi DUK adalah aplikasi yang digunakan untuk menginput jumlah data pegawai sesuai urutan kepangkatan, gol, dan TMT Jabatan. Pengadilan Negeri Sekayu mempunyai 26 pegawai yang senantiasa selalu berkoordinasi dengan bagian staff kepegawaian jika mereka membutuhkan informasi mengenai kepegawaian. Dalam kurun waktu sekian tahun ini, untuk mendapatkan informasi mengenai kepegawaian (cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, dll) pegawai yang bersangkutan mendatangi langsung bagian kepegawaian, sehingga mengurangi efisiensi waktu serta pegawai harus banyak bertatap muka secara langsung dengan para atasan dan bagian kepegawaian, selain itu juga bagian kepegawaian membutuhkan waktu pencarian untuk informasi tersebut sehingga mengganggu pekerjaan.

Untuk mengatasi permasalahan diatas mulai dikembangkanlah Aplikasi SI-KUPEK (Sistem Informasi dan Koordinasi Urusan Kepegawaian) untuk mempermudah pegawai mendapatkan informasi kepegawaian tanpa harus mendatangi langsung. Cukup dengan membuka langsung aplikasi ini di *web browser* dengan situs <http://sikupek.pn-sekayu.id> dan login dengan user masing-masing, sehingga mengurangi interaksi secara langsung.



Gambar 1 Aplikasi SI-KUPEK Admin



Gambar 2 Aplikasi SIKUPEK Pegawai

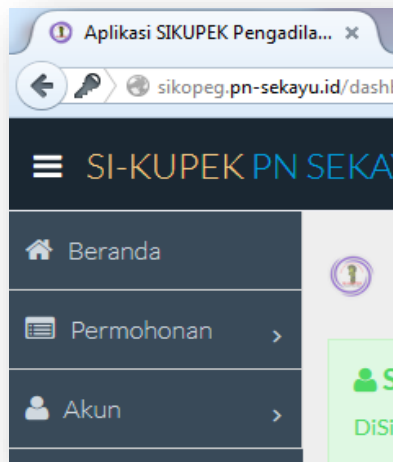
Adapun salah satu keunggulan aplikasi SI-KUPEK yaitu untuk mengetahui informasi jumlah cuti dan pengajuan cuti pegawai secara langsung. Untuk pengajuan cuti, pegawai yang bersangkutan cukup mengisi form pengajuan yang telah di sediakan pada aplikasi. Pegawai juga dapat melihat apakah cuti sudah di setuju oleh atasan langsung dan pejabat berwenang. Jika sudah di setuju oleh keduanya form pengajuan cuti yang telah diisi langsung bisa dicetak.

Berikut menu yang bisa diakses oleh admin atau staff bagian kepegawaian pada aplikasi SI-KUPEK



Gambar 3 Menu Admin Aplikasi Si-Kupek

Menu yang bisa diakses oleh pegawai pada aplikasi SIKUPEK



Gambar 4 Menu Pegawai Aplikasi Si-Kupek

Untuk informasi mengenai kepegawaian dapat mengakses situs <http://sikupek.pn-sekayu.id/slideduk>

No	Nama/Tempat,Tanggal Lahir	JK	NIP Karpeg	K/ Pendidikan Terakhir	Jumlah Gol./Rumus	Pangkat Gol./Rumus	TMT	Pangkat Jabatan		Nama Jabatan	PD Kantor Terbit/Tgl	PNS/ CPNS	Gaji Pokok	KGB	Agama	Jml Anak
								Masa Kerja Gol								
1	BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H, M.H.	L	197809012001121002	L.026886	K 52	2013	IV/a	00-00-0000	19 11	Ketua	00-00-0000	PNS	4.151.100,00	00-00-0000	Kristen	3
2	ANNISA NOVIYATI, S.H., M.H.LI	PR	197807132001122003	L.030538	K 52	2017	IV/a	01-04-2018	16 04	Wakil Ketua	08-11-2020	PNS	4.024.400,00	01-12-2019	Islam	4
3	BARANG HERMANTO, S.H	K	19670705198803100	L.395464	K 51	1994	III/d	01-04-2007	32 01	PP	03-11-2015	PNS	4162900	01-03-2019	Islam	2
4	BEDDY HIRLIANA GABRI, S.H.	PR	19800812000042001	N135562	K 51	2003	III/d	01-04-2018	14 00	Sekretaris	22-12-2015	PNS	3628900	01-04-2020	Islam	2
5	ANDY WILLIAM FERHATA, S.H.	LK	198206222007041001	288286	K 51	2005	III/d	01-04-2019	13 00	Hakim	22-01-2017	PNS	3214700	01-04-2019	Islam	1
6	CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.	LK	197812252007041001	N128326	K 51	2002	III/d	01-04-2019	13 00	Hakim	30-01-2017	PNS	3214700	01-04-2019	Kristen	1
7	FAHRIZAL, S.Kom, S.H.	LK	198108132005021002	N145923	K 51	2014	III/d	01-10-2019	15 02	PP	26-08-2019	PNS	3375300	01-10-2019	Islam	2
8	HADI CANDRA, S.H.	LK	19760808200904100	P332201	K 51	2000	III/d	11-05-2021	12 03	Panmud Pidana	11-05-2021	PNS	3.375.300	01-04-2021	Islam	2
9	ABUNAWAS, S.H	LK	197005201092031004	P250159	K 52	2016	III/d	18-12-2021	17 07	Panitera	18-12-2020	PNS	3.612.600,00	01-03-2019	Islam	2
10	SAHRUNI, S.Kom	LK	198603202009041003	Q018356	K 51	2008	III/c	01-04-2017	11 00	Kasubag UMKEU	06-07-2017	PNS	3110500	01-04-2019	Islam	2
11	RIZZYKARIVAN, S.H	LK	1984020822009121002	792/KR.I/2011	TK 51	2008	III/c	01-04-2018	10 04	Hakim	28-11-2016	PNS	3272200	01-12-2019	Islam	-
12	ENIK PEDI ENDORA, S.H., M.H.	LK	198308102009121004	N451307	K 52	2016	III/c	01-04-2018	11 00	Panmud Perdata	11-05-2021	PNS	3.375.300	01-12-2021	Islam	3

Gambar 5 Informasi Kepegawaian

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Secara umum pelaksanaan anggaran DIPA sudah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk operasional. Adapun rincian pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

DIPA 01

Data Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sekayu

Tabel 15
PAGU DIPA 01

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA 01	Total Realisasi		Sisa (Rp)
			Rupiah	Persentase	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	Rp 3.393.870.000,-	Rp 3.079.469.902,-	90,75 %	Rp 314.400.098,-
2	Belanja Barang	Rp 1.681.481.000,-	Rp 1.636.597.925,-	97,33 %	Rp 44.883.075,-

Data Realisasi Anggaran Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sekayu

Tabel 16 **PAGU DIPA BELANJA MODAL**

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Total Realisasi		Sisa (Rp)	Ket
			Rupiah	Persentase		
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	77.500.000,-	77.150.000,-	99.55%	350.000,-	Pengadaan • PC Kepaniteraan • Printer
	- Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	190.000.000,-	189.600.000,-	99.79%	400.000,-	• Peralatan Fasilitas Perkantoran

Tabel 17 PENANGANAN PANDEMI COVID 19

AKUN	PAGU (Rp)	REALISASI	SISA DANA (Rp)
521131 (Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID 19)	3.000.000,-	99,98 %	500,-
521841 (Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID 19)	1.335 .000,-	88,46%	154.000,-

DIPA 03

Data Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sekayu

Tabel 18 PAGU DIPA 03

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Total Realisasi		Sisa (Rp)	Ket
			Rupiah	Persentase		
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Barang	235.437.000	234.978.849	99,81 %	458.151	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan Sarana dan Prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB. Pengelolaan ini meliputi manajemen aset barang milik negara (BMN) dan pengadaan sarana dan prasarana. Aset yang dikelola meliputi Kendaraan Dinas, Rumah Dinas dan Sarana/Prasarana.








Data Keadaan Kendaraan Dinas Pada Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sekayu sebagai berikut :




Tabel 19 DATA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA






No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Roda 4					
	a. Station Wagon	2005		✓		
	b. Minibus	2010		✓		
	c. Station Wagon	2016		✓		
	d. Station Wagon	2019	✓			
	e. Station Wagon	2019	✓			
2	Kendaraan Roda 2					
	a. Motor	2006	✓			
	b. Motor	2008	✓			
	c. Motor	2008	✓			
	d. Motor	2012	✓			


Data Keadaan Rumah Dinas Pada Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sekayu sebagai berikut :

Tabel 20 DATA KEADAAN RUMAH DINAS TAHUN 2022

No	Uraian	Foto	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 1 Sekayu		✓			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 2 Sekayu	 		✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi
3.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 3 Sekayu	 		✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi
4.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 5 Sekayu	 		✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi

No	Uraian	Foto	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
5.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 6 Sekayu			✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi
6.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Jalan Pramuka Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu			✓		Posisi / letak Rumah tersebut lebih rendah dari jalan raya sehingga jika hujan turun sering mengalami banjir disamping itu juga atap dan lantai juga rusak ringan
7.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Jalan Pramuka Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu			✓		Posisi / letak Rumah tersebut lebih rendah dari jalan raya sehingga jika hujan turun sering mengalami

No	Uraian	Foto	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						banjir disamping itu juga atap dan lantai juga rusak ringan
8.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Jalan Merdeka Kel. Balai Agung Kec. Sekayu			✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi
9.	Rumah Dinas Hakim Beralamat di Jalan Koprak Hanafiah Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu				✓	Kondisi rumah ini sudah hancur berat dan tidak layak dihuni
10	Rumah Dinas Panitera Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 7 Sekayu	 		✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond, lantai dan kamar mandi
11	Rumah Dinas Sekretaris Beralamat di Komp. Pengadilan Jalan Merdeka LK VII Nomor 4 Sekayu			✓		Kondisi Rumah tersebut rusak pada bagian atap, plafond,

No	Uraian	Foto	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						lantai dan kamar mandi

Dan Sub Bagian Umum dan Keuangan telah berupaya melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap rumah negara tersebut dengan menggunakan anggaran belanja operasional pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya. Akan tetapi karena terkait dengan aturan nilai kapitalis pemeliharaan gedung dan bangunan sehingga pemeliharaan tersebut tidak maksimal. Dan Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan juga telah berulang kali mengajukan perencanaan Belanja Modal Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara akan tetapi belum di anggarkan oleh Mahkamah Agung RI.

SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sekayu dibangun di atas tanah seluas 6.446m², terdiri dari 2 (dua) lantai, dimana Ruang Ketua, Wakil Ketua, Ruang-Ruang Hakim yang terintegrasi dengan Ruang Panitera Pengganti, Ruang Panitera, Ruang Sekretaris, Ruang Command Center, Ruang Arsip, Ruang Alat, Ruang *Pantry*, Ruang Tamu Terbuka, Ruang Server, Ruang Dharmayukti Karini dan Ruang Rapat berada di lantai 2.

Adapun penataan ruangan-ruangan sebagai berikut:

1. 4 (empat) ruang sidang yang terdiri dari 1 (satu) ruang sidang utama, 1 (satu) ruang sidang khusus anak dan 2 (dua) ruang sidang biasa.
2. Ruang Kerja Ketua/Wakil Ketua, satu ruang masing-masing untuk Ketua dan Wakil Ketua, yang mana ruang kerja Ketuajuga untuk menerima tamu dan dilengkapi dengan toilet dan AC. Begitu juga dengan ruang kerja Wakil Ketua.
3. Ruang Rapat pimpinan yang terkoneksi dengan ruang Ketua .

Selain yang tersebut diatas masih ada Ruang Panitera, berdekatan dengan ruang Wakil Ketua, Ruang Sekretaris, Ruang Kepaniteraan, terdiri dari Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum yang terhimpun menjadi satu kesatuan ruang, Ruang Kesekretariatan yang juga terhimpun menjadi satu Ruang, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala dan Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan, Ruang Posbakum, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Tahanan, Ruang Tunggu Penasehat Hukum. Sedangkan pada bagian belakang Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sekayu terdapat Ruang Perpustakaan, Ruang Arsip, Ruang Ramah Anak, Ruang Klinik, Ruang Laktasi, dan Ruang Teleconference.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pengadilan Negeri Sekayu mendapatkan Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin berupa alat pengolah data 3 unit PC Komputer untuk Kepaniteraan dan 1 paket peralatan Antrian Sidang.

SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung yang adadi Pengadilan Negeri Sekayu adalah:

Tabel 21 SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG PENGADILAN NEGERI SEKAYU

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	3	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	4	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
9	Ruang Panitera Pengganti	3	
10	Ruang Perpustakaan	1	
11	Ruang Posbakum	1	
12	Ruang Tunggu Jaksa	1	
13	Ruang Tahanan dewasa dan	4	
14	anak	1	
15	Ruang tunggu Penasehat	1	
16	Hukum	1	
17	Ruang Ramah Anak	1	
18	Ruang Klinik	1	
19	Ruang Laktasi	38	
20	Ruang Teleconference	18	
21	Komputer	1	
22	Laptop	1	
23	Infokus	40	
24	PABX	1	
25	AC	2	
26	Faximile	2	
27	Genset	6	

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
28	Handycam	3	
29	LCD Monitor	2	
30	Scanner	7	
31	Server	2	
32	Alat sidik jari	1	
33	CCTV	1	
34	Router	17	
35	Brangkas	8	
36	Filling Kabinet	1	
37	Lemari Besi	8	
38	Gordyn	80	
39	Sounds System	173	
40	Meja kerja kayu	21	
41	Kursi besi/metal	9	
42	Lemari Kayu	-	
43	Kursi tamu	121	
44	Lemari Toga	5	
45	Kursi kayu	9	
46	Meja sidang	22	
47	Kursi sidang hakim	12	
48	Bangku panjang besi/metal	11	
49	Sekat ruang sidang	8	
50	Rak Besi	1	
51	Rak Kayu	1	
52	Fire Alarm	1	

Untuk Tahun Anggaran 2022 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin telah dimaksimalkan penggunaannya, diantaranya untuk pemeliharaan gedung bangunan dan halaman gedung, pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan kendaraan dinas roda 4, komputer, printer, AC Split, dll. Barang milik negara tersebut telah dalam proses pengajuan penetapan status penggunaan.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Umum

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018, tentang administrasi pengadilan secara elektronik, diciptakanlah suatu sistem layanan yang dapat memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem layanan "ecourt" ini, adalah perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan dan pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.

Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Sekayu telah mengimplementasikan e-court sejak tahun 2019. Sosialisasi mengenai e-court juga telah disampaikan kepada intern Pengadilan Negeri Sekayu, Pemkab Musi Banyuasin, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Kepolisian Resor Musi Banyuasin dan Para Advokat. Jumlah perkara yang telah mendaftar melalui e-court tahun 2022 adalah sebanyak :

Tabel 22 Jumlah Perkara yang mendaftar melalui e-court PENGADILAN NEGERI SEKAYU

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Masuk	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara yang belum diselesaikan
1.	Gugatan	45	33	12
2.	Gugatan Sederhana	10	10	0
3.	Permohonan	29	29	0
4.	Banding	12	7	5

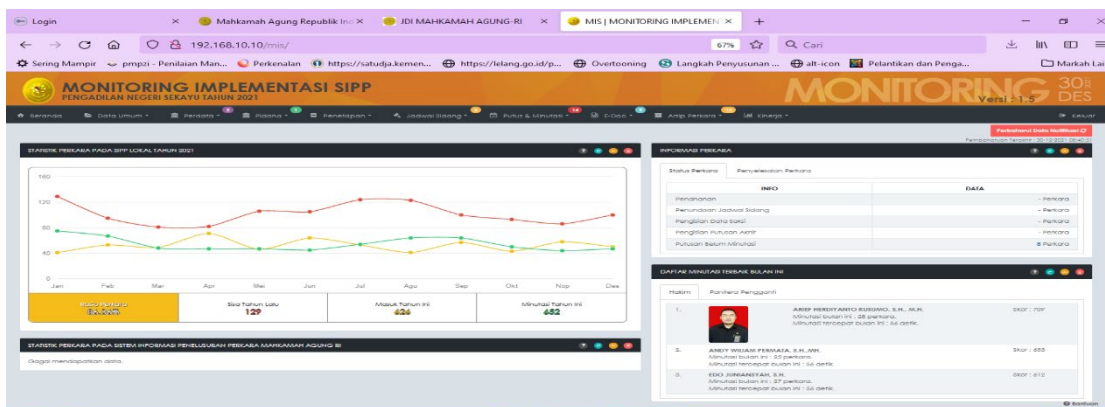
- Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

SIPP merupakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi kepada publik, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu. Pengadilan Negeri Sekayu telah melakukan peningkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan pengisian data SIPP. Nilai capaian pengisian SIPP dapat dilihat pada Evaluasi Implementasi SIPP yang dapat diakses dengan alamat website <http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/>.

Berikut Nilai capaian pengisian SIPP Pengadilan Negeri Sekayu per tanggal 31 Desember 2022 dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang:

Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

URL : <http://192.168.10.10/mis>



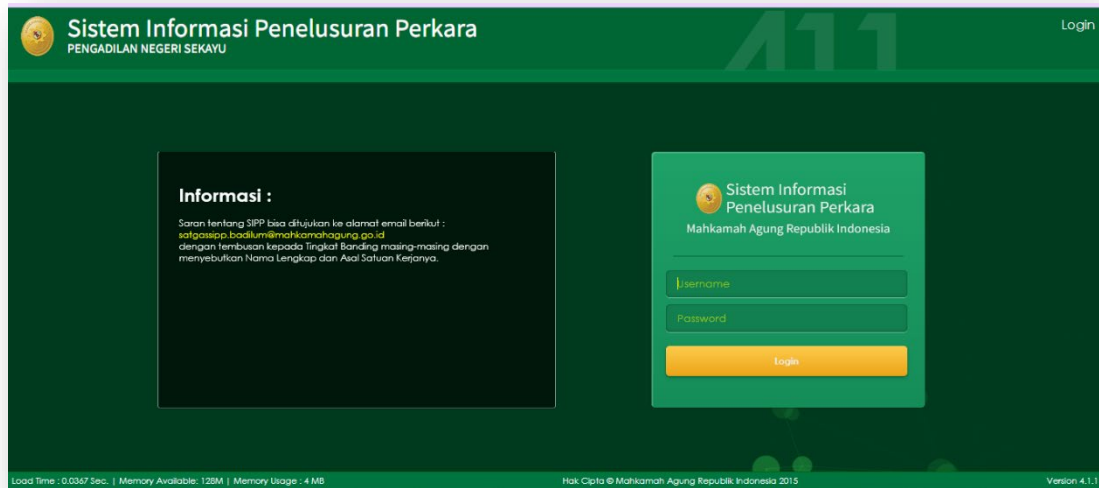
Aplikasi monitoring yang berfungsi sebagai alat bantu untuk meminimalkan kebutuhan pengguna dalam mengisi aplikasi SIPP.

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

URL: <http://sipp.pn-sekayu.go.id/>

Akses Untuk masyarakat umum dan pencari keadilan.

Local: <http://192.168.10.10/SIPP32>



Manajemen administrasi di internal Pengadilan Negeri Sekayu, dijalankan oleh seluruh bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu beserta Panitera Pengganti. Sampai saat ini Pengadilan Negeri Sekayu telah menerapkan SIPP versi 5.1.0 yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Palembang maupun Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya.

- Implementasi e-Berpadu di Lingkungan Peradilan Umum

E-berpadu merupakan bagian dari Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang diharapkan menjadi media pertukaran dokumen khususnya pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan APH lain. Sistem ini diharapkan mempercepat terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sistem e-Berpadu merupakan “embrio” perwujudan sistem peradilan pidana elektronik (e-Court Pidana), sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem ini dibangun untuk menyelenggarakan administrasi perkara pidana, perkara jinayat, dan perkara pidana militer secara terpadu berbasis elektronik.

Aplikasi e-BERPADU meliputi berbagai macam pelayanan, di antaranya yaitu: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, dan permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, serta penetapan diversi.

Tabel 23 Berkas Perkara yang telah menggunakan berpadu per 31 Desember 2022

NO	PELAYANAN	JUMLAH BERKAS
1.	e-pelimpahan	165
2.	e-penggeledahan	52
3.	e-sita	241
4.	e-penahanan	57
5.	e-penahanan Tk banding	2
6.	e-penahanan MA	-
7.	e-pembantaran	-
8.	e-diversi	1
9.	e-izin besuk	7
10.	e-izin pinjam pakai	3

Sebagai bagian dari Pilot Project untuk implementasi Aplikasi e-BERPADU pada tahap pertama, Pengadilan Negeri Sekayu telah mulai menjalankan e-berpadu sebagai aplikasi elektronik berkas pidana terpadu pada bagian Kepaniteraan Pidana sejak 5 September 2022 hingga saat ini.

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki *system* Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan dan SK KMA nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Paradilan.

Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB, yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu. Hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya Surat Keputusan nomor : 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2022 tentang Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai 712 Predikat A pada tanggal 10 Maret 2021. Tidak sampai disitu, Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan bersih bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Pengadilan Negeri Sekayu telah melakukan pencanangan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sejak tanggal 26 Februari 2019 sebagai wujud kesungguhan institusi Pengadilan Negeri Sekayu dalam memantapkan jati diri dan identitas sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai dengan upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.



Gambar 6 Pencanangan Zona Integritas PN Sekayu yang di upload di Website PN Sekayu



Gambar 7 Spanduk Pencanangan Zona Integritas PN Sekayu

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri melalui satu pintu. Wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

3239/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang perubahan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

Adapun tujuan dari PTSP adalah Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/III/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Penyelenggaraan PTSP Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, serta Subbagian Umum dan Keuangan.



Gambar 8 Ruang Pelayanan PTSP

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sekayu serta peningkatan kinerja bagi Pegawai Pengadilan Negeri Sekayu, maka perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Berikut beberapa inovasi dikembangkan oleh tim IT di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas IB :

1. Aplikasi Antrian PTSP

Sesuai dengan amanat Perdirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, yang mengharuskan setiap Pengadilan untuk memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari Pelayanan Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum dan Bagian Umum, guna mempermudah pengguna layanan Pengadilan tersebut. Untuk menunjang pelayanan tersebut maka Pengadilan Negeri Sekayu juga membuat aplikasi antrian sidang agar para pengguna layanan PTSP dapat mengetahui kapan akan dilayani oleh masing-masing bagian tersebut

Hal ini tentunya akan menciptakan keteraturan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.



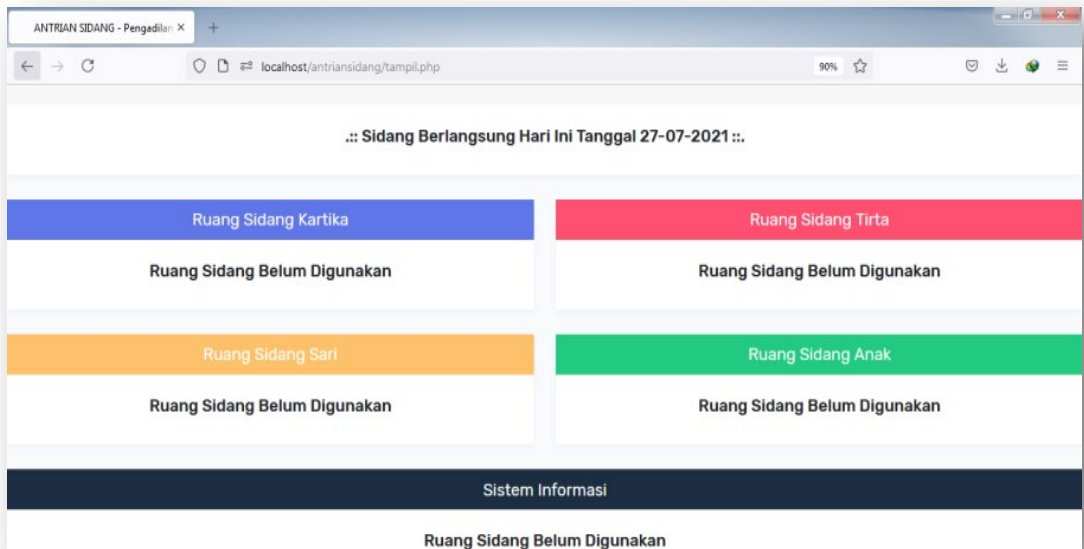
Gambar 9 Antrian PTSP

2. Aplikasi Antrian Sidang

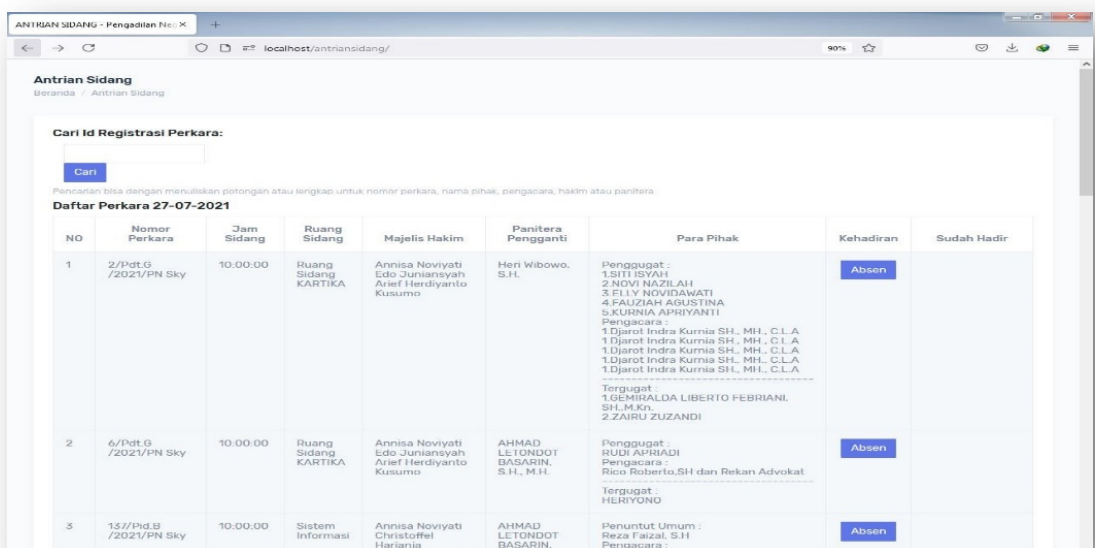
Layanan utama Pengadilan Negeri adalah pelayanan persidangan perkara, baik perkara Pidana maupun perkara Perdata. Jumlah perkara di Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2022 adalah :

- 1. Perkara Pidana Biasa : 513
- 2. Perkara Pidana Anak : 14
- 3. Perkara Perdata Gugatan : 45
- 4. Perkara Perdata Gugatan Sederhana : 10
- 5. Perkara Permohonan : 29

Untuk memberikan pelayanan yang optimal, maka untuk proses persidangan juga dibuat aplikasi antrian sidang, sehingga dalam memberikan pelayanan masyarakat mengetahui kapan perkara tersebut akan disidangkan. Dimana rata-rata dalam 1 (satu) hari majelis hakim menyidangkan 15-20 perkara.



Gambar 10 Antrian Sidang



Gambar 11 Antrian Sidang

Menyikapi perkembangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) serta memperhatikan kebijakan pemerintah dalam menyusun Tata Normal Baru telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Tata Normal Baru, ditindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor : W6.U7/504/KP.04.10/III/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Jarak Jauh atau Teleconference pada Pengadilan Negeri Sekayu.

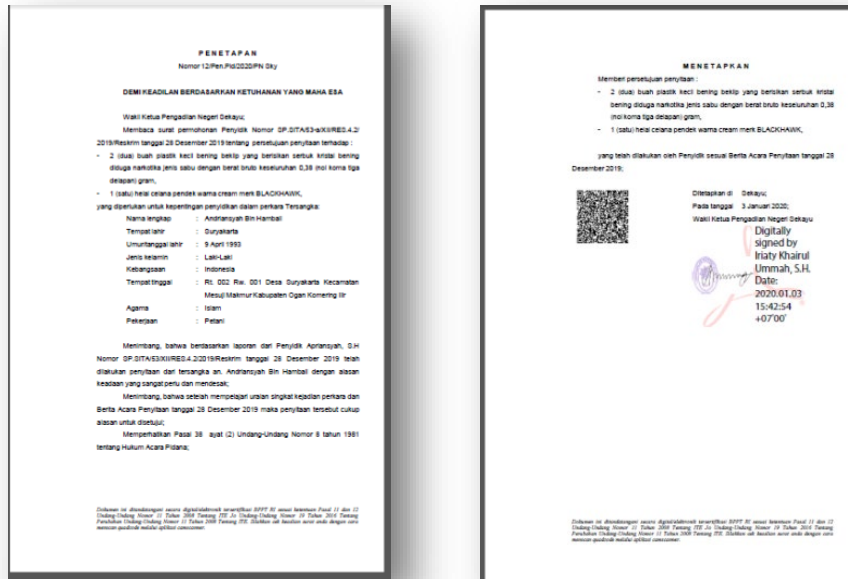
Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID 19 pada Lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu maka diperlukan pelaksanaan persidangan perkara pidana jarak jauh atau Teleconference sehingga proses persidangan dapat tetap berjalan dengan baik dan lancar dengan jumlah perkara 4254 perkara dan tetap menggunakan Protokol Kesehatan yaitu : memakai masker, sanitizer dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya



Gambar 12 Persidangan secara Online

4. Tanda Tangan Elektronik

Dengan telah dikembangkannya beberapa layanan dengan memanfaatkan teknologi seperti SPPT yang mengharuskan pemohon untuk meng-*upload* dokumen secara elektronik kemudian Pengadilan Negeri Sekayu juga mengoptimalkan pelayanan dengan cara menerapkan Tanda Tangan Elektronik yang sesuai dengan Pasal 11 ayat 1, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 52 ayat 1 dan 2 PP No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Serta Peraturan OJK No 77/2016 pasal 1 ayat 15. Sehingga dokumen yang dihasilkan akan ditandatangani secara elektronik oleh Pengadilan Negeri Sekayu yang telah tersertifikasi oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) Jakarta, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang di tandatangi secara konvensional.



Gambar 13 Dokumen Yang Ditandatangani Secara Elektronik

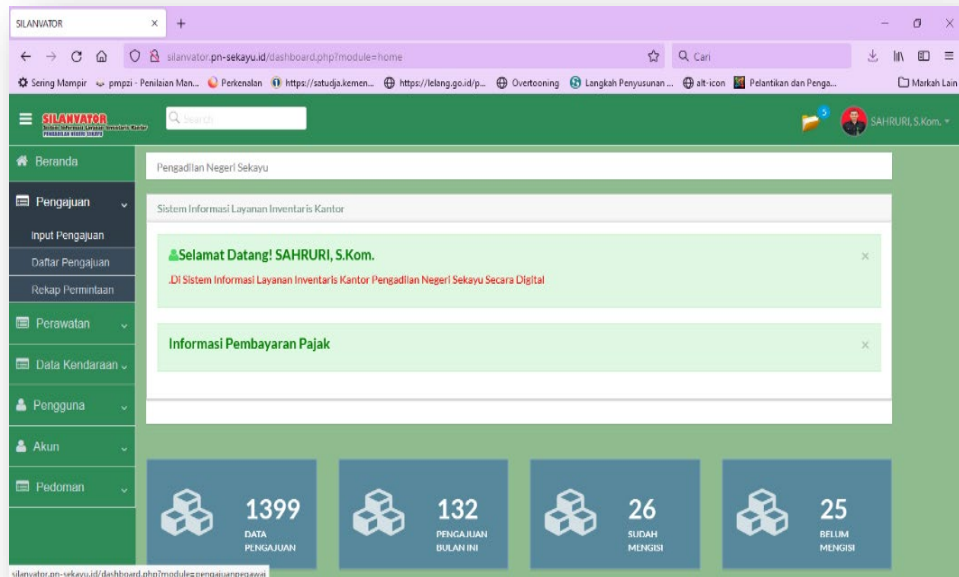
5. Aplikasi SILANVATOR

Aplikasi SILANVATOR (Sistem Informasi Layanan Inventaris Kantor) adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam menghitung Permintaan Alat Tulis Kantor. Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Sekayu selama ini dalam pengajuan ATK (Alat Tulis Kantor) masih menggunakan cara manual dengan membuat form permintaan ATK (Alat Tulis Kantor) dan didistribusikan ke setiap ruangan. Sedangkan untuk perekapannya, Sub Bagian Umum dan Keuangan harus menghitung setiap permintaan ATK dari setiap ruangan kemudian mengelompokkannya. Setelah itu hasil dari rekapan tersebut di input ke dalam komputer menggunakan *Microsoft Office Excel* untuk mengetahui jumlah permintaan ATK pada Pengadilan Negeri Sekayu.

Permintaan ATK dengan cara diatas masih belum efektif karena selain dengan telah berkembangnya teknologi pada saat ini, cara tersebut membuat suatu pekerjaan menjadi lebih lama dan membutuhkan kesabaran yang maksimal untuk menghitung dan mengelompokkan ATK di setiap lembaran yang diberikan dari setiap ruangan, belum lagi nama barang yang ditulis kurang spesifik mengakibatkan pengelompokan daftar barang ATK membutuhkan waktu yang lama.

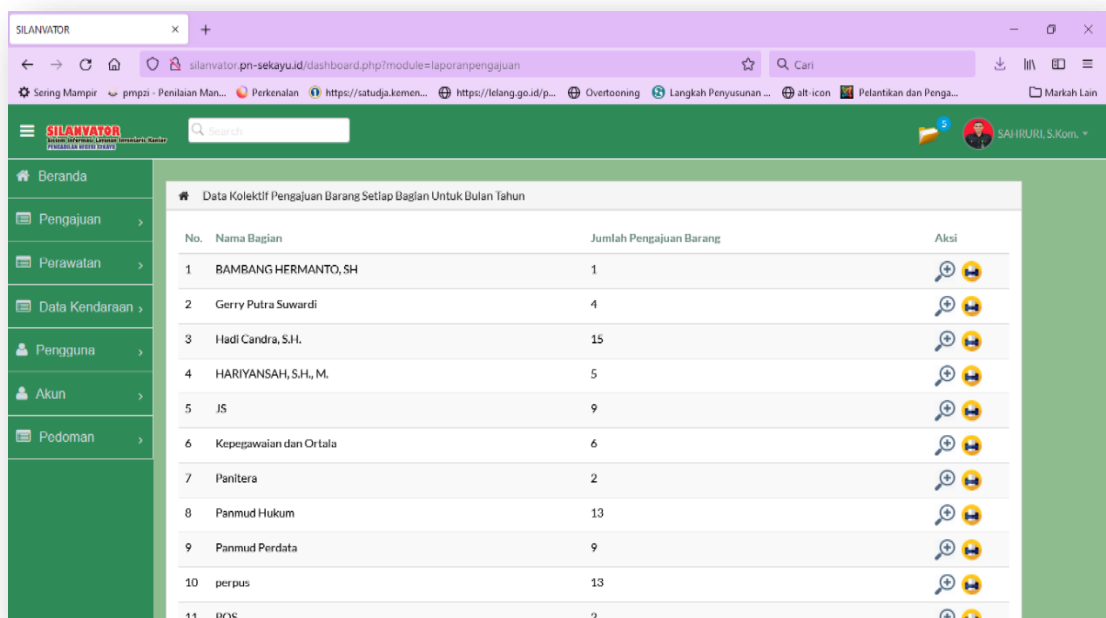
Oleh karena itu maka dicarilah solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan dibuatlah aplikasi SILANVATOR ini karena dengan aplikasi ini setiap ruangan yang akan mengajukan permintaan tidak perlu lagi menggunakan form permintaan tetapi dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan di daftar ATK pada aplikasi tersebut, pengguna dapat langsung login pada <http://silanvator.pn-sekayu.id/>.

Kemudian pengguna dapat langsung menginput pengajuan pada menu pengajuan-input pengajuan.



Gambar 14 Aplikasi SILANVATOR

Keuntungan menggunakan aplikasi ini selain cepat dan efisien aplikasi ini tidak menggunakan media kertas dalam pengajuan permintaan ATK. Aplikasi ini juga tersistem untuk mengetahui rekap permintaan dari setiap ruangan dalam aplikasi dan bisa dilihat pada halaman admin untuk dicetak.



Gambar 15 Daftar Pengajuan di Halaman Admin

6. Aplikasi PTSP SIMBA(Sinergi MUBA)

Adalah Layanan Aplikasi PTSP Sinergi Muba dan merupakan aplikasi layanan hukum yang diprakarsai oleh Pengadilan Negeri Sekayu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses semua informasi serta layanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat meliputi Permohonan Ganti Nama(E-Court), Surat Keterangan Tidak Pidana (Eraterang), Informasi Sidang (SIPP) dan Info Tilang.



Gambar 16 Aplikasi PTSP SIMBA

Keunggulan aplikasi Sistem Informasi ini bisa mempermudah masyarakat yang jauh dari area sekayu untuk membuat Suket, permohonan ganti nama, dan informasi SIPP tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Sekayu cukup ke kantor Kecamatan masing-masing.

7. Mobil Antar Jemput Difabel

Layanan Mobil antar jemput difabel pengguna layanan PTSP ini dibuat, guna mempermudah bagi Penyandang difabel untuk mendapatkan pelayanan kantor Pengadilan Negeri Sekayu dan Pengadilan Negeri Sekayu telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. guna mengsosialisasikan inovasi tersebut, agar pesan tersebut sampai ke masyarakat luas. Dimana Penyandang difabel yang akan menggunakan layanan Pengadilan Negeri Sekayu akan dijemput dan diantarkan kembali kerumahnya dan menggunakan mobil dinas kantor Pengadilan Negeri Sekayu dengan cara 2 hari sebelum menggunakan layanan tersebut pengguna layanan dapat menghubungi call center yang dikemudian akan diteruskan ke sekretaris kemudian apabila mendapat persetujuan maka pengguna layanan akan segera dijemput dan diantarkan, untuk sementara layanan tersebut hanya mencakup wilayah kota sekayu saja.



Gambar 17 Mobil Layanan Antar Jemput Difabel Pengadilan Negeri Sekayu

8. Self Service Corner

Self Service Corner adalah sarana yang diberikan bagi masyarakat pengguna layanan PTSP untuk melengkapi dokumen persyaratan layanan yang dibutuhkan etika terdapat kekurangan/ kesalahan pada berkas/dokumen yang dibutuhkan, sehingga masyarakat tidak perlumencari tempat yang menyediakan jasa rental atau kembali kerumah untuk memperbaiki berkas tersebut. Sarana yang diberikan pada self service corner berupa komputer, printer, kertas dan jaringan internet yang memadai dan layanan tersebut diberikan secara Gratis



Gambar 18 Pojok Layanan Mandiri

9. Ruang Pengaduan

Ruang pengaduan adalah sarana yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan PTSP yang merasa kurang puas terhadap layanan PTSP dan diruang pengaduan ini masyarakat akan dilayani langsung oleh penanggungjawab pelaksanaan atau pejabat pengelola PTSP. Ruang pengaduan di fasilitasi dengan minuman ringan, ruang yang nyaman dan berAC



Gambar 19 Ruang Pengaduan

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengadilan Negeri Sekayu berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung yaitu terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu. Pada Pengadilan Negeri Sekayu pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya.

Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang, Jurubicara, E-court dan PTSP berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu No. W6.U7/2097/KP.04.12/VII/2022. Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan pada bidang masing-masing kemudian membuat laporan pengawasan setiap 1 (satu) bulan yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor W6.U7/2087/KP.04.12/VII/2022 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Sekayu. Hakim Pengawas dan Pengamatan mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Gambar 20 Briefing terhadap petugas PTSP dan Security



Gambar 21 Hakim Pengawas Bidang sedang melakukan pengawasan



Gambar 22 Rapat Bulanan sekaligus Pemantauan Kinerja

B. EVALUASI

Salah satu fungsi pengawasan adalah sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan ini akan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja untuk perbaikan dimasa mendatang.

Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2022 telah melakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang yaitu dengan :

1. Melaksanakan rapat pengawasan bidang masing-masing setiap bulan pada minggu kedua dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat rutin bulanan setiap bulan pada minggu ketiga untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja Pengadilan Negeri Sekayu.
2. Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa masing-masing bidang sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan setiap bulan pada minggu keempat.



Gambar 23 Evaluasi penilaian Kinerja Tenaga Honorer

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan maupun program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan juga telah dilakukan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada serta sarana dan prasarana yang ada.

Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sekayu sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing-masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik. Pengadilan Negeri Sekayu juga berupaya untuk semakin meningkatkan pengembanganteknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Sekayu telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin walaupun masih terdapat beberapa kekurangan di beberapa aspek.

B. SARAN

1. Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis dan Non Teknis guna menghasilkan tenaga yang terampil dan profesional dalam bidangnya.
2. Perlu diadakan penambahan staf pada Pengadilan Negeri Sekayu, baik untuk bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

**Kantor Pengadilan Negeri Sekayu :
Jl. Merdeka, No. 485, RT. 03/02,
Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu,
Kabupaten Musi Banyuasin, (30711)**